

Fikih Good Governance (Electronic Government dalam Nalar *Mashlahat*)

Abdul Helim*

Abstract

The main motivation of this article is to explore the trend of modern people in using of technology development in some sectors especially in government bureaucracy. The purpose of this article is to discuss the existence and e-government law status in logical benefit. Normative study in Islamic law is done by the primary, secondary, tertiary case that can be displayed through the inductive and deductive method used by contextual approach model. Analysis data were done by the content analysis that was supported by adaptional-participational theory. E-government is a contemporer problem that can be seen in the study of laws pertaining to ritual obligations. The present of e-government is to increase the effectiveness to work in giving the best service to Indonesian people. There are some advantages that can be gotten and proved empirically by the implementation of e-government. The problems were limited the number of qualified human resources and infrastructure to support of the e-government. The government' attention to the implementation of e-gov is very important. Therefore, significantly, e-gov is as the information publication medium, interaction, and transaction forum. These advantages could be primary, logically, and it was not in contradiction to the Islamic law. At the present, e-gov should be applied in the real life. Meanwhile, if the process and outcome of the implementation of e-gov can be found some distortion, so e-gov is a activity that is forbidden to be done.

Key words: E-gov, Advantage.

* Penulis adalah dosen pada Jurusan Syari'ah STAIN Palangka Raya. Mata kuliah keahlian yang diampu adalah *Ushul* Fikih. Tepat pada bulan April 2008, penulis telah menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dalam Program Studi Pemikiran Islam dengan konsentrasi Fikih/*Ushul* Fikih. Penulis berdomisili di Jl. Meranti Gg. Istiqamah RT. 02 RW. VI No. 27 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Alamat e-mail (abdulhelim@yahoo.com) atau (helim1377@gmail.com). Telp. 081349150759.

A. Pendahuluan

Menanggapi pelbagai kemajuan khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, Indonesia sebagai negara yang berkembang dituntut untuk memperhatikan persoalan kemajuan teknologi ini. Disebut sebagai teknologi karena proses penyampaian informasi dan komunikasi tersebut menggunakan fasilitas komputer yang dikoneksikan melalui jaringan internet. Apabila dibandingkan dengan beberapa negara di Asia, Indonesia masih dipandang ketinggalan menggunakan teknologi tersebut.¹ Namun dengan lahirnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government,² istilah *electronic government* (selanjutnya ditulis *e-gov*) mulai populer di sebagian kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah juga ingin menikmati kemajuan teknologi tersebut.

Salah satu tujuan penerapan *e-gov* adalah untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain melalui jaringan elektronik. Tujuan lainnya adalah untuk memperbaiki, meningkatkan efisiensi dan transparansi kerja serta meningkatkan pula etos kerja aparat pemerintah terutama dalam lingkup pelayanan kepada masyarakat. Apabila hal ini dapat dilakukan, hampir dipastikan akan bermanfaat bagi segenap warga negara Indonesia.³

Kehadiran *e-gov* (fikih) di tengah kehidupan masyarakat Indonesia ini cukup penting untuk dikaji secara serius dan ilmiah. Hal ini disebabkan bahwa *e-gov* berskala nasional dan ditujukan untuk kepentingan (kemaslahatan)

¹ Ade Rachmawati Devi, et.al, *Penerapan Electronic Government: Melompatlah Jika Tak Ingin Tertinggal*, <http://www.warta-egov.com/default.asp>, Rabu 26 Juli 2006, 10:14 WIB, Diakses 30 April 2007, h. 1.

² Edmon Makarim, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 575-578.

³ Anonim, *Konsep Perencanaan dan Perancangan E-Government (Pada Pemda Kab. Pekalongan)*, <http://www.mti.ugm.ac.id/~adji/courses/resources/students/Toto/Konsep%20Perencanaan%203.Doc>, 2006, Diakses tanggal 30 April 2007.

makro. Berkaitan dengan kepentingan di atas, Islam sebagai agama yang komplit memiliki sebuah disiplin ilmu yang disebut metodologi penggalian (*istinbâth*) hukum Islam atau disebut pula *ushûl* fikih. Salah satu teori dalam ilmu ini adalah metode *mashlahat*. Metode ini beroperasi secara khusus untuk menggali (*istinbâth*) dan menemukan serta memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan dalam hukum Islam (fikih) termasuk persoalan *e-gov*. Semua legislasi (*tasyri'*) fikih (*e-gov*) dalam metode ini mesti ditujukan untuk mencapai kemaslahatan hakiki dalam arti mendatangkan atau menarik suatu kemaslahatan dan menolak kemudaratatan untuk umat manusia.⁴

E-gov sebagai hasil dari produktivitas manusia tidak luput dari sorotan metode di atas. Sorotan tersebut dipastikan bertujuan untuk mengetahui apakah eksistensi *e-gov* sejalan dengan semangat dan jalur serta ukuran standar metode *mashlahat* atau sebaliknya. Diharapkan melalui kajian ini, status hukum *e-gov* dapat diketahui.

B. Permasalahan dan Tujuan Penelitian

Masalah-masalah yang difokuskan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan eksistensi dan status hukum *e-gov* dalam nalar intelektual *mashlahat*. Tujuannya untuk mengkaji eksistensi dan status hukum *e-gov* dalam nalar intelektual *mashlahat*.

C. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa peneliti terdahulu yang meneliti *e-gov* di Indonesia. Ade Rachmawati Devi, dkk. Pada tahun 2006 telah melakukan pengkajian tentang

⁴ Abū Muhammad Abdullah ibn Ahmad al-Maqdisi Ibn Qudāmah, *Raudhat an-Nazhîr wa Junnat al-Manāzhîr*, Pentabkik Abdul Aziz Abdurahman Sa'id, Cet. II, Riyādh: Jamī'at al-Imam Muhammad ibn Su'ūd, 1979, h. 169. Lihat pula dalam Abdul Karīm ibn 'Alī ibn Muhammad Namlah, *Ithāf Zawī al-Bashāir bi Syarh Raudhat an-Nazhîr fi Ushûl al-Fiqh 'alā Mazhab al-Imam Ahmad ibn Hambal*, Cet. I, Jilid IV, Riyādh: Dār al-'Ashimat, 1996, h. 306. Begitu juga dapat dilihat dalam Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, Cet. XII, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978, h. 84.

e-gov dengan judul *Penerapan Electronic Government: Melompatlah Jika Tak Ingin Tertinggal*. Hasil penelitian tersebut, Indonesia masih jauh ketinggalan dalam penggunaan teknologi jika dibandingkan dengan negara-negara Asia. Oleh karena itu apabila Indonesia ingin lebih maju, pemerintah Indonesia mesti membangun perekonomian Indonesia dari berbasis pertanian menuju ekonomi berbasis teknologi (strategi lompat katak), tanpa melewati ekonomi industri.⁵

Susartono peneliti dari Universitas Negeri Surakarta pada tahun 2006 juga melakukan penelitian tentang *e-gov* dengan judul *E-Government di Indonesia*. Hasil penelitian ini adalah hanya ada 64 situs pemerintah di pelbagai daerah Indonesia yang ditemukan dan di antaranya masih ada yang tidak dapat diakses. Bahkan sebagian besar situs-situs yang dapat diakses hanya menyediakan layanan informasi yang bersifat *publish*. Adapun layanan interaksi, tampaknya juga masih belum optimal. Satu hal yang ditekankan Susartono, satu pun tidak ada situs yang memberikan layanan berbentuk transaksi, kecuali hanya melalui *Service Short Message* (SMS) yang sebenarnya masih berbentuk layanan informasi.⁶

Eddy Satria pada tahun yang sama yaitu 2006 melakukan pula sebuah penelitian dengan judul *Pentingnya Revitalisasi E-Government di Indonesia*. Hasil penelitian ini, pentingnya pemerintah melakukan revitalisasi pelaksanaan *e-gov*. Apabila ditunda, maka sama artinya dengan menjauhkan negeri ini dari cita-cita reformasi yang sebenarnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan efisiensi birokrasi.⁷

⁵ Ade Rachmawati Devi, *et.al*, *Penerapan Electronic*, Diakses 30 April 2007, h. 1.

⁶ Susartono, *E-Government di Indonesia*, dalam http://www.fisip.uns.ac.id/publikasi/sp2_1_susartono.pdf, 2006, Diakses 1 April 2009.

⁷ Eddy Satria, *Pentingnya Revitalisasi E-Government di Indonesia*, dalam <http://www.Batan.go.id/sjk/eII2006/Page01/Poli.pdf>, 2006, Diakses 1 April 2009.

Peneliti lainnya yaitu Juni S., dengan judul *Implementasi E-Government di Indonesia*. Dalam penelitian ini, Juni S. mempertanyakan tentang bagaimana implementasi *e-gov* di Indonesia. Dalam karya ini Juni S. menemukan aparat birokrasi dipandang tidak mampu menjaga *web portal* untuk selalu *up date*. Ketidakmampuan ini menimbulkan paradigma proyek masih melekat di kepala para aparat tersebut, sehingga implementasi *e-gov* sebagaimana Instruksi Presiden No.3 tahun 2007 dianggap sebagai proyek tanpa memikirkan pemanfaatan jangka panjang. Akibatnya, sikap tersebut sama artinya menciptakan ketergantungan terhadap "rekanan tertentu", yang pada akhirnya akan menjadikan implementasi *e-gov* tidak berbeda dengan proyek lainnya. Akibat lainnya sikap seperti itu termasuk membuka ladang KKN baru bagi birokrat di pemerintahan.⁸

Ali Rokhman pada tahun 2008 lalu mengadakan penelitian lanjutan dengan judul *Customer Service Pemerintah melalui E-Government*. Hasil penelitiannya layanan *costumer service* belum dimanfaatkan secara maksimal. Keadaan ini disebabkan oleh tiga hambatan utama *peopleware*, *organoware*, *hardware*. Para admin (*peopleware*) tidak memiliki wewenang untuk menjawab interaksi dengan masyarakat, sementara kewenangan untuk menunjuk pejabat atau pegawai terkait untuk memberikan jawaban aspirasi (*organoware*) tidak dimiliki para admin, sedangkan untuk meneruskan aspirasi itu kepada pejabat atau pegawai terkait, juga masih belum didukung peralatan (*hardware*) yang representatif.⁹

Itulah hasil dari pelbagai upaya yang telah dilakukan untuk menelusuri hasil-hasil penelitian yang mengkaji persoalan *e-gov*. Hasil dari penelusuran

⁸ Juni S. *Implementasi E-Government*, <http://www.pureportals.com/Default.aspx?tabid=210050&newsType=ArticleView&articleId=8482007>, Diakses 1 April 2009.

⁹ Ali Rokhman, *Customer Service Pemerintah melalui E-Government*, dalam <http://72.14.235.132/custom?q=cache:jZY3XuQW6bwJ:lpks1.wima.ac.id/pphks/accurate/makalah/MOSS6.pdf+hambatan+electronic+government&cd=26&hl=en&ct=clnk&client=pub-2808051115066427>, 2008, Diakses 13 April 2009.

tersebut tampaknya dalam sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang meneliti eksistensi dan status hukum *e-gov* melalui kaca mata agama atau lebih spesifik melalui ilmu *ushûl* fikih. Berdasarkan hal tersebut penulis menyatakan di sinilah letak perbedaan antara penulis dengan peneliti-peneliti terdahulu.

D. Kerangka Teori

Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori adaptabilitas-partisipatoris.¹⁰ Adaptabilitas diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menyesuaikan atau disesuaikan dengan kondisi dan keperluan tertentu.¹¹ Partisipatoris diartikan sebagai turut serta atau berperan serta dalam suatu kegiatan.¹² Adaptabilitas-partisipatoris adalah kemampuan sesuatu untuk menyesuaikan diri dalam suatu kondisi tertentu untuk ikut berpartisipasi pada suatu kegiatan yang dihadapi oleh sesuatu tersebut.

Teori adaptabilitas-partisipatoris sebenarnya telah banyak digunakan para pakar kontemporer. Kendati pun mereka tidak menyebut istilah adaptabilitas-partisipatoris, namun apabila dikaji kembali tampaknya memiliki persamaan dengan maksud, tujuan dan perspektif sebagaimana yang terdapat dalam kajian ini. Para pakar itu di antaranya Fazlur Rahman yang memperkenalkan teori gerak ganda (*double movement*).¹³ Seseorang yang ingin memahami ayat Alquran, hadis atau pun hasil pemikiran, mesti melengkapi dirinya dengan pengetahuan historis dan persoalan-persoalan

¹⁰ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005, h. 15.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 6.

¹² Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, Surabaya: Bintang Timur, 1993, h. 449.

¹³ Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif : Neomodernisme Islam*, Diterjemahkan dan disunting oleh Taufik Adnan Amal dari beberapa artikel Fazlu Rahman yang berbahasa Inggris, Bandung: Mizan, 1989, h. 25.

yang melatarbelakangi ayat Alquran, hadis atau pun hasil pemikiran tersebut.¹⁴ Langkah yang dilakukan, seorang pengkaji masuk ke dunia ketika teks-teks tersebut diturunkan atau dikeluarkan dan kemudian keluar dari dunia itu serta masuk kembali ke dunia kekinian untuk mengadaptasikannya sesuai kondisi sekarang.¹⁵

Pakar lainnya seperti Mahmūd Muḥammed Taha yang memperkenalkan teori *the first message* (pesan pertama)¹⁶ dan *the second message* (pesan kedua)¹⁷ serta adanya pengembangan makna *naskh*.¹⁸ Melalui teori ini tampak Taha juga menggunakan teori adaptasi-partisipatoris terhadap ayat-ayat Alquran dengan zaman sekarang. Abdullah Ahmed an-Na'im murid Taha melakukan pengkajian kembali untuk memperkuat dan mengembangkan teori-teori gurunya itu.¹⁹ Begitu juga Hasan al-Turabi yang menyeru pembaharuan *ushūl* fikih sekaligus menawarkan metodologi *ushūl* fikih integratif.²⁰ Hal ini juga menunjukkan adanya upaya menggunakan model berpikir yang kini disebut adaptabilitas-partisipatoris.

¹⁴ Fazlur Rahman, *Islam*, Diterjemahkan oleh Seoaji Saleh dari buku asli yang berjudul "Islam," Jakarta: Bumi Askara, 1992, h. 63.

¹⁵ Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif*, h. 26.

¹⁶ Mahmūd Muḥammed Taha, *Syari'ah Demokratik*, Diterjemahkan oleh Nur Rachman dari buku asli yang berjudul "The Second Message of Islam," Surabaya: eLSAD, 1996, h. 179.

¹⁷ *Ibid.*, h. 213.

¹⁸ *Naskh* sebagaimana dalam Q.S [2: 106] menurut teori Mahmūd Muḥammed Taha diartikan sebagai "penundaan atau penangguhan." Pemaknaan seperti ini tidak memandang bahwa ayat yang *dinaskh* tidak berlaku lagi sebagaimana yang diartikan kebanyakan para pakar. Penundaan ini sebenarnya berkaitan dengan waktu sehingga ketika sampai pada masa yang tepat ayat-ayat yang sebelumnya ditunda dapat dilaksanakan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam *Ibid.*, h. 22-23.

¹⁹ Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, Diterjemahkan oleh Ahmad Suedy dkk dari buku asli yang berjudul "Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law," Yogyakarta: LKiS, 2004, h. 99-100.

²⁰ Hasan al-Turabi, *Fiqh Demokratis: dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, Diterjemahkan oleh Abdul Haris dkk, dari buku asli yang berjudul

Selanjutnya, sesuatu yang ingin diadaptasikan sehingga memiliki nilai partisipasi yang tinggi adalah metode *mashlahat*. Metode ini dihasilkan dari perdebatan panjang dan cukup rumit sampai akhirnya layak menjadi metode. Kelayakan ini dapat dilihat setelah mazhab Hanafi²¹ (walaupun disebut sebagai *istihsân*), mazhab Maliki,²² mazhab Syafi'i;²³ (walaupun pada awalnya sikap mazhab ini tidak jelas),²⁴ dan mazhab Hambali²⁵ menyepakati untuk menerima dan menjadikan *mashlahat* sebagai salah satu metode terkuat dalam (*istinbâth*) penggalian hukum Islam. Artinya metode *mashlahat* telah teruji bahkan telah banyak menyelesaikan dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan

"Tajdid al-Fikr al-Islami", Bandung: Mizan, 2003, h. 50-56.

²¹ Abu Zahrah, *Abū Hanīfah : Hayātuhu wa 'Ashruhu- Arā'uhu wa Fiqhuhu*, Cet I, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1997, h. 209-314. Imām al-Haramain Abī al-Ma'ālī Abdul Mālik ibn Abdullah ibn Yūsuf al-Juwainī, *al-Burhān fī uṣūl al-Fiqh*, Juz II, Cet I, Beirut-Libanon: Dār al-Kutb al-'Ilmiyah, 1997, h. 161. Muhammad Sa'id Ramadhān Būthī, *Dhawābith al-Mashlahat fī asy-Syari'at al-Islāmiyah*, Cet. VI, Beirut-Libanon: Mu'assasat ar-Risālah, 2001, h. 57, 330-331. Husain Muhammad Mallah, *al-Fatāwā: Nasy'atuhā wa Tathawwuruhā – Ushūlūhā wa Tathbiqatuhā*, Juz I, Cet. I, Beirut: al-Maktabat al-'Ashriyah, 2001, h. 133-135, 488.

²² Muhammad Sa'id Ramadhān Būthī, *Dhawābith al-Mashlahat*, h. 319. Husain Muhammad Mallah, *al-Fatāwā: Nasy'atuhā*, Juz II, h. 486. Mushthafa Ahmad Zarqa, *Hukum Islam & Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Mazhab*, Diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana dari buku asli yang berjudul "al-Istishlāh wa Mashāliḥ al-Mursalat fī asy-Syari'at al-Islāmiyah wa Uṣūl Fiqh," Cet. I, Jakarta: Riora Cipta, 2000, h. 66.

²³ Imām al-Haramain Abī al-Ma'ālī Abdul Mālik ibn Abdullah ibn Yūsuf al-Juwainī, *al-Burhān fī uṣūl*, Juz II, h. 161. Lihat pula dalam Abī Hāmid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazālī, *al-Mustashfā fī 'Ilm al-Uṣūl*, Pentastih oleh Muhammad 'Abdussalām 'Abdugganī, Beirut-Libanon: Dār al-Kutb al-'Ilmiyah, 2000, h. 179. Husain Hāmid Hasan, *Nazhariyah al-Mashlahat fī al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dār an-Nahdhāt al-'Arabiyah, 1971, h. 310-314.

²⁴ Apabila meneliti kembali isi *ar-Risālah* Imam Syafi'i benar adanya bahwa ia tidak mencantumkan *mashlahat* sebagai salah satu metode fikihnya. Lebih rincinya dapat dilihat dalam Muhammad ibn Idris As-Syafi'i, *ar-Risālah*, Kairo: Dār al-Turāṭ, 1979. Lihat pula dalam Saifuddin Abī al-Hasan 'Alī ibn Abī 'Alī ibn Muhammad al-Amidī, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Jilid II Juz IV, Beirut-Libanon: Dār al-Fikr, 1996, h. 308.

hukum Islam (fikih). Beranjak dari fakta empiris ini, metode *mashlahat* pun layak untuk dijadikan sebagai tolak ukur dalam menganalisis suatu persoalan salah satunya *e-gov* di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini disebut sebagai penelitian normatif (doktrin)²⁶ dalam hukum Islam²⁷ atau disebut pula sebagai penelitian agama.²⁸ Bahkan lebih spesifik disebut sebagai penelitian fikih (*e-gov* merupakan kreasi manusia)²⁹ Data-data ilmiah digali dari bahan primer, sekunder, dan tertier.³⁰ Data-data tersebut disajikan dengan menggunakan metode induksi³¹ dan deduksi³² dengan model pendekatan kontekstual.³³

²⁶ Abu Zahrah, *Ibn Hanbal: Hayâtuhi wa 'Ashruhu- Arâ'uhu wa Fiqhuhu*, Cet I, Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1997, h. 230-231. Husain Muhammad Mallah, *al-Fatâwâ: Nasy'atuha*, Juz II, h. 488.

²⁷ Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: UI Press, 1986, h. 51. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h. 43. Lihat pula Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. II, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, h. 45.

²⁸ Amir Mu'allim, *et.al.*, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Cet. I, Yogyakarta: UII Press, 1999, h. 94.

²⁹ Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*, Cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, h. 36-37.

³⁰ Bandingkan dengan Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Cet. I, Jakarta: Prenada Media, 2003, h. 339.

³¹ Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, h. 51-52. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian*, h. 114-117. Sarjono Soekanto, *et.al.*, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 23.

³² Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Cet II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, h. 57.

³³ *Ibid.*

³⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Edisi IV, Cet. I, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000, h. 263.

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode *content analysis*³⁴ dan ekstensifikasi makna (*tharīqat al-ma'awiyat*)³⁵ yang didukung dari teori adaptabilitas-partisipatoris. Eksistensi *e-gov* dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*, sedangkan melalui metode ekstensifikasi makna, pemaknaan metode *mashlahat* diperluas untuk menganalisis hasil analisis metode *content analysis* untuk mengetahui status hukum *e-gov*. Proses perluasan makna ini dilakukan dengan cara menggali *'illat* atau motivasi, semangat, tujuan dan prinsip umum yang terkandung pada metode *mashlahat* untuk diadaptasikan pada kasus-kasus kongkrit seperti *e-gov*.

F. Pembahasan

1. Sekilas tentang *E-Gov*

a. Pengertian *E-Gov*

E-gov berasal dari dua kata "*electronic government*" diartikan sebagai sebuah cara yang dilakukan pemerintah dalam menggunakan teknologi informasi khususnya aplikasi internet berbasis web. Tujuannya untuk menyediakan akses informasi secara mudah dan merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat termasuk pula meningkatkan kualitas pelayanan, serta melakukan transformasi hubungan antara pejabat publik dengan penduduk dan juga bisnis.³⁶ Pengertian lainnya bahwa *E-gov* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan yang efisien dan murah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara menyediakan sarana publik sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi, dan menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab serta transparan kepada masyarakat.³⁷

³⁴ Cik Hasan Bisi, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Bandung: Ulul Albab Press, 1997, h. 53.

³⁵ Amir Mu'allim, et.al., *Konfigurasi Pemikiran*, h. 96.

³⁶ Juni S. *Implementasi E-Government*, 2007, Diakses 1 April 2009.

³⁷ Chandra, *Electronic Government*, dalam <http://chandrax.wordpress.com/2008/05/21/electronic-government-e-government/>, 2008, Diakses 13 April 2009. Lihat pula dalam

Umumnya pemerintah-pemerintah di dunia yang mengimplementasikan *E-Gov* menggunakan definisi dari Bank Dunia, bahwa *e-gov* adalah pemanfaatan teknologi informasi (seperti *wide area Network*, internet, *mobile computing*) oleh agen pemerintah yang mampu mentransformasi hubungan dengan penduduk, bisnis serta unit pemerintah lainnya.³⁸ Jelasnya dengan *e-gov* ini instansi pemerintah dapat melaksanakan pelbagai kegiatan dengan lebih mudah, cepat, transparan, tertib, terpadu, akurat, dan efisien.³⁹

Secara garis besar dari definisi-definisi yang beredar mengenai *E-Gov* dapat disimpulkan bahwa *E-Gov* mempunyai beberapa penekanan penting yaitu adanya pemanfaatan teknologi informasi (Internet, WAN, *Mobile Computing* dll), tujuan untuk meningkatkan layanan kepada publik yaitu dengan adanya pelayanan umum secara *online* (*Online Public Services*). Selain itu adanya tujuan untuk melakukan transformasi hubungan antara agen pemerintah dengan penduduk, bisnis ataupun dengan unit pemerintah lainnya.

b. Bentuk-Bentuk Pelayanan dan Implementasinya dalam *E-Gov*

Idealnya, ada beberapa bentuk layanan yang terdapat pada *e-gov* yaitu publikasi, interaksi dan transaksi.⁴⁰ Bentuk layanan pada publikasi adalah berkaitan dengan penyediaan informasi kepada masyarakat, pelaku bisnis dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Bentuk layanan ini merupakan tahap implementasi *e-gov* yang paling mudah. Sebab cakupannya yang lebih kecil

Eddy Satriya, *Electronic Government*, dalam <http://eddyasatriya.blogspot.com/2004/05/electronic-government.html>, 2004, Diakses 13 April 2009.

³⁸ *Word Bank*, <http://www1.worldbank.org/publicsector/e-gov/definition.htm>, Diakses 13 April 2009.

³⁹ Anonim, *E-Gov: Hambatan Kami, Terbatasnya Anggaran dan SDM*, <http://solusi.hukum.com/berita.php?id=321>, 2004, Diakses 13 April 2009.

⁴⁰ Helmy Fitriawan, *E-Government : Sistem Layanan Publik Berbasis Teknologi Komunikasi dan Infoemasi*, <http://elang.miste.unila.ac.id/~helmy/paper/Egovernment%20Sistem%20layanan%20publik%20berbasis%20teknologi%20info.pdf>, 2008, Diakses 13 April 2009.

dan penerapannya pun hanya memerlukan aplikasi sederhana. Melalui media komputer atau *hand phone*, orang yang berkepentingan dapat mengakses sumber informasi tersebut.⁴¹

Beberapa implementasi melalui bentuk layanan ini seperti; masyarakat dapat melihat profil pejabat serta wakil rakyat, beberapa peraturan yang telah ditetapkan dan Rencana Anggaran Belanja Negara atau pun Daerah. Seorang peneliti dapat melihat data statistik suatu daerah untuk dijadikan sebagai bahan kajian dalam penelitiannya. Seorang investor dapat mengetahui prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan investasi pada suatu daerah. Masyarakat dapat pula melihat pengumuman lowongan, penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil atau informasi-informasi beasiswa dan sebagainya. Wisatawan dari luar daerah juga dapat mengetahui potensi pariwisata suatu daerah, transportasi dan bahkan hotel di daerah tersebut.

Bentuk layanan kedua adalah interaksi. Melalui bentuk layanan ini masyarakat dapat mencari dan memperoleh informasi berdasarkan suatu kriteria yang unik. Maksudnya, antara masyarakat dan pemerintah memungkinkan dapat berkomunikasi secara dua arah. Interaksi ini dapat dijalin melalui situs portal, *e-mail*, *mailing list*, *internet relay chatting*, *teleconference*, web TV dan sebagainya.⁴² Beberapa implementasi melalui bentuk layanan ini seperti, masyarakat dapat berdiskusi secara langsung melalui *mailing list* dengan pemerintah. Masyarakat pun dapat memilih atau memberikan pendapat tentang wakil rakyat dan pejabat secara langsung melalui media *electronic voting*. Begitu juga dalam bidang kesehatan, masyarakat dapat melakukan pendaftaran ke Puskesmas atau rumah sakit yang diinginkan. Suatu dinas pemerintahan yang membuka lowongan kerja dapat melakukan tes penerimaan secara langsung (*online*) melalui internet dan perusahaan swasta yang akan membuka cabang di suatu tempat dapat berdiskusi dan melakukan tanya jawab dengan instansi terkait mengenai

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi serta banyak lagi manfaat yang diperoleh melalui bentuk layanan ini.

Bentuk layanan yang terakhir adalah transaksi. Bentuk ini sama dengan bentuk layanan kedua yang dapat melakukan komunikasi dua arah. Perbedaannya hanya bahwa masyarakat dapat mencari dan membeli suatu produk atau membayar jasa layanan dan mengumpulkan informasi yang diolah. Aplikasi yang digunakan di sini jauh lebih kompleks serta melibatkan sistem keamanan (*security*) yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan dengan aman dan melindungi hak-hak privat pihak yang bertransaksi.⁴³ Beberapa implementasi melalui bentuk layanan ini seperti; masyarakat dapat mengurus permohonan baru atau memperpanjang KTP, SIM atau passport secara *online*. Pembayar pajak dapat mengisi formulir-formulir pajak dan membayar kewajiban tersebut secara *online*. Proses tender pun dari berbagai proyek pemerintah dapat dilangsungkan secara *online* dan *real time*. Bahkan para petani dan nelayan juga dapat menjual produknya pada pasca panen ke institusi yang berkaitan.

Itulah beberapa bentuk layanan dalam *e-gov*. Diakui sampai sekarang pemerintah belum memaksimalkan penggunaan ketiga bentuk layanan tersebut dan masih jauh dari yang diharapkan. Bahkan di antara situs web pemerintah tersebut ada yang tidak bisa diakses.⁴⁴ Namun demikian hal yang mesti diakui bahwa pemerintah di beberapa daerah di Indonesia pun telah berupaya melakukan hal tersebut, walaupun masih berada pada bentuk layanan publikasi.⁴⁵ Tentunya bagi pemerintah daerah yang belum menyentuh ke arah penerapan *e-gov*, merupakan suatu hal yang mesti dipertimbangkan sejak sekarang.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Juni S. *Implementasi E-Government*, 2007, Diakses 1 April 2009.

⁴⁵ Edwi Arief Sosiawan, *Tantangan dan Hambatan Implementasi E-Government di Indonesia*, <http://edwi.dosen.upnyk.ac.id>, Maret 2008, Diakses 13 April 2009.

c. Manfaat Penerapan *E-Gov* di Indonesia

Ada beberapa manfaat yang dijadikan sebagai alasan pentingnya menerapkan *e-gov* dalam birokrasi pemerintahan saat ini, di antaranya adalah dapat memberikan layanan dan informasi tanpa batasan waktu dan tempat. Masyarakat dapat mengakses informasi serta layanan tanpa harus terikat batasan waktu dan tempat. Informasi dan layanan pun disediakan selama 24 jam sehari 7 hari seminggu dan 365 hari setahun. Pencari informasi sendiri tidak mesti dan merepotkan diri untuk datang secara fisik ke kantor pemerintah penyedia informasi dan layanan yang diperlukannya.⁴⁶ Begitu juga sebaliknya, pemerintah tidak perlu juga menyediakan pegawai yang khusus memberikan informasi. Selain untuk menghindari adanya penyelewengan informasi yang diberikan juga menghindari kekeliruan interpretasi pegawai tersebut dengan maksud dan tujuan yang diinginkan secara ideal dalam sebuah instansi.

Manfaat berikutnya, dengan diterapkannya *e-gov* sebenarnya dapat memperluas jangkauan pemberian layanan dan informasi. Kondisi ini sangat berguna bagi investor untuk mengetahui potensi salah satu daerah. Luasnya lingkup pelayanan ini, maka dengan sendirinya dapat memberikan layanan yang lebih berkualitas, mengurangi besarnya biaya administrasi. Waktu yang dihabiskan masyarakat lebih efektif. Apabila hal ini dapat diimplementasikan, tentunya informasi dan layanan lebih gampang diperoleh masyarakat tanpa harus melewati pelbagai meja birokrasi yang tidak jarang harus mengeluarkan biaya administrasi yang banyak.⁴⁷

Manfaat pelayanan secara elektronik multimedia (*electronic form*) ini lebih menarik dan berkualitas jika dibandingkan dengan layanan informasi yang berbasis kertas (*paper form*). Kualitas tersebut dapat dilihat dari

⁴⁶ Budi Rahardjo, Makalah : Membangun E-Government, URL <http://www.geocities.com/seminarts/e-gov-makassar.doc>, 2001, Diakses 1 April 2009. Lihat pula dalam Chandra, *Electronic Government*, Diakses 13 April 2009. Begitu juga dapat dilihat dalam Helmy Fitriawan, *E-Government : Sistem*, Diakses 13 April 2009.

⁴⁷ Ibid.

terjaminnya transparansi, akuntabilitas dan kontrol dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *good corporate governance*. Transparansi, akuntabilitas dan kontrol yang baik dapat menghilangkan kecurigaan dan kekesalan dari masing-masing pihak. Koordinasi pemerintahan pun dapat berjalan secara efektif dan efisien.⁴⁸

Manfaat selanjutnya *e-gov* dapat dijadikan sebagai media umpan balik (*feedback*) dari masyarakat dan pemerintah untuk menyampaikan pendapat dan pandangan, sehingga dapat mendorong terciptanya pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Selain itu masyarakat juga merasa diikutsertakan sebagai mitra pemerintah di dalam proses pengambilan kebijakan publik.⁴⁹ Dengan demikian apabila diperhatikan secara baik bahwa tujuan akhir dari penerapan *e-gov* ini sebenarnya mewujudkan kemaslahatan masyarakat Indonesia.

d. Beberapa Hambatan dalam Implementasi E-Gov di Indonesia

Dilihat secara umum, ada beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan *e-gov*. Hambatan-hambatan tersebut dapat berupa kultur berbagi (*sharring*) informasi dan mempermudah urusan di lembaga-lembaga pemerintahan Indonesia masih belum terbentuk sebagai sebuah kesadaran. Bahkan ada pameo yang mengatakan: "Apabila dapat dipersulit mengapa dipermudah?". Terkait dengan hal ini tidak sedikit oknum yang menggunakan kesempatan tersebut untuk mempersulit mendapatkan informasi.⁵⁰

Hambatan berikutnya bahwa kultur mendokumentasi belum lazim dilakukan. Padahal apabila disadari dokumentasi sebenarnya salah langkah penting di dalam organisasi atau birokrasi pemerintahan. Begitu pula dilihat

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Helmy Fitriawan, *E-Government : Sistem*, Diakses 13 April 2009. Informasi ini dapat pula dilihat dalam Anonim, *Konsep Perencanaan dan*, Diakses tanggal 30 April 2007.

dari kaca mata agama, Allah sebenarnya telah mengajarkan untuk mencatat³¹ pelbagai kegiatan yang dilakukan dan kemudian mendokumentasikannya secara tertib dan sistematis sehingga ketika diperlukan akan secara mudah ditemukan.³²

Hal yang mesti pula mendapatkan perhatian bahwa Infrastruktur yang tersedia belum memadai. Pernyataan ini dibuktikan secara real bahwa infrastruktur tersebut belum tersebar secara merata di pelbagai daerah. Daerah-daerah tertentu di Indonesia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik ada yang masih belum tersedia. Namun meski semua fasilitas tersebut tersedia, harga untuk mengadakannya pun masih relatif mahal, sehingga berakibat pula dengan terbatasnya sarana-sarana untuk mengakses informasi-informasi yang dibutuhkan. Pemerintah pun juga belum menyiapkan pendanaan (*budget*) untuk keperluan tersebut.³³

Persoalan lainnya adalah masih langkanya Sumber Daya Manusia yang handal baik dalam organisasi pemerintahan atau pun bagi masyarakat sendiri. Khususnya bagi pemerintah, dengan langkanya Sumber Daya Manusia ini terkadang dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah bahkan dengan harga yang tinggi³⁴ atau adanya konspirasi untuk mendapatkan keuntungan besar.

³¹ Lihat perintah Allah untuk mencatat pelbagai transaksi yang dilakukan dalam Q.S al-Baqarah [2:282]. Dalam beberapa ayat yang lain, tampaknya Allah tidak hanya memerintahkan manusia melakukan pencatatan, namun Allah sendiri juga melakukan pencatatan tersebut. Lihat dalam Q.S. an-Naba [78: 29] dan Q.S. al-Qamar [54: 52].

³² Lihat dalam Q.S at-Takwir [81:10] yang artinya "dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka. Lihat juga dalam Q.S. Qaf [50: 23] yang artinya "dan yang menyertai dia berkata: inilah (catatan amalnya) yang tersedia padaku". Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa ada proses pencatatan terhadap pelbagai sesuatu kemudian didokumentasikan secara rapi dan selanjutnya ketika diperlukan dokumentasi-dokumentasi tersebut dibuka sebagai bahan bukti. Dari sini dapat diketahui, Allah pun tampaknya menggunakan asas legalitas, asas kepastian dan asas pembuktian hukum.

³³ Helmy Fitriawan, *E-Government : Sistem*, Diakses 13 April 2009.

³⁴ Ibid.

2. Eksistensi *E-Gov* dalam Perspektif *Mashlahat*

a. Pemaknaan *E-gov*

Memperhatikan kembali uraian sebelumnya bahwa *e-gov* tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalin hubungan dengan masyarakat warga negara Indonesia melalui media elektronik. Hubungan tersebut dapat dilakukan secara berkualitas, mudah, murah dan transparan yang akhirnya melalui mediasi ini pemerintah dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Apabila pemaknaan di atas ditemukan dengan epistemologi atau metodologi fikih (*ushūl fikih*), tampaknya *e-gov* sebagai suatu rangkaian kegiatan termasuk dalam ruang lingkup *mahkūm fih* atau disebut berkaitan dengan perbuatan-perbuatan *mukallaf* (orang yang telah cakap berbuat hukum).⁵⁵ Perbuatan-perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang secara materi menjadi sebab terwujudnya hukum syarak.⁵⁶ Sebagai hukum syarak perbuatan-perbuatan ini dapat bersifat tuntutan untuk dilaksanakan, tuntutan untuk ditinggalkan, atau hanya sebagai pilihan untuk dilaksanakan atau ditinggalkan.⁵⁷ Orang-orang yang mengoperasikan dan memanfaatkan *e-gov* dalam perspektif *mahkūm fih* adalah orang yang mesti mengetahui dengan baik seluk beluk⁵⁸ *e-gov* dan cakap menggunakannya.⁵⁹

Apabila melalui *e-gov* hubungan pemerintah dengan *user* terjalin secara berkualitas, mudah, murah, transparan dan dinilai sebagai dapat

⁵⁵ Abu Zahrah, *Ushūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, Tth, h. 249. Wahbah Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz I, Damaskus-Suriyah: Dār al-Fikr, 2001, h. 132.

⁵⁶ Muhammad Zakariya al-Bardisi, *Ushūl al-Fiqh*, Mesir: Dār an-Nahdhah al-'Arabiyah, 1969, h. 121. Lihat pula dalam Amir Bad Syah, *Taisir al-Tahrir*, Jilid II, Mesir: Mushtafā al-Bāb al-Halabī, 1351, h. 148.

⁵⁷ Muhammad Zakariya al-Bardisi, *Ushūl al-Fiqh*, h. 121. Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilm Ushūl*, h. 128.

⁵⁸ Ibid. Lihat pula dalam Wahbah Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh*, Juz I, h. 133.

⁵⁹ Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilm Ushūl*, h. 130. Lihat pula dalam Wahbah Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh*, Juz I, h. 134.

memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, maka hal ini sejalan dan senafas dengan misi yang dibawa metode *mashlahat*. Metode ini populer di kalangan para pakar hukum Islam sebagai sebuah upaya untuk mendatangkan kebaikan dan menolak suatu kemudharatan beserta sarana-sarana yang menyertainya.⁶⁰ Bahkan upaya yang dilakukan melalui *e-gov* tidak jauh berbeda dengan sebuah upaya untuk menegakkan kehidupan manusia secara sempurna yang dapat pula membantu tercapainya keinginan-keinginan baik bersifat *syahwati* maupun *aqli* manusia.⁶¹

Persoalan yang muncul kemudian adalah bahwa *e-gov* hanya berkaitan dengan kehidupan lahir atau kehidupan dunia. Pertanyaan pun akhirnya timbul apakah *e-gov* layak disebut bernilai *mashlahat* atau sebaliknya. Sebenarnya apapun bentuk kegiatan –termasuk *e-gov*– yang dapat memberikan kebaikan, manfaat atau faedah-faedah serta melalui kegiatan tersebut dapat pula secara langsung menjauhkan kemudharatan atau kesengsaraan, maka ia layak disebut bernilai manfaat sebagaimana yang dikehendaki metode *mashlahat*.⁶²

Kendati pun *e-gov* –secara formatif– bersifat duniawi, namun apabila mengkaji kembali misi yang dibawa metode *mashlahat*, maka metode ini sebenarnya tidak membedakan antara kemaslahatan yang berkaitan dengan kehidupan lahir maupun batin,⁶³ atau kemaslahatan yang bersifat dunia maupun akhirat.⁶⁴ Bahkan apabila suatu kegiatan yang awalnya bersifat keduniaan namun dapat mendatangkan kebaikan kepada publik (umum), maka

⁶⁰ Abi Abdillāh Muhammad ibn Umar ibn al-Husain Fakhruddīn ar-Rāzī, *al-Maḥshūl fī 'Ilm al-Uḥūl*, Jilid II, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1999, h. 282.

⁶¹ Abi Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Gharnāthī asy-Syāthibī, *al-Muwāfaqat fī Uḥūl al-Ahkām*, penta'lik Muhammad al-Khudri al-Husain at-Taulisi, Jilid I, Juz II, ttp: Dār al-Fikr, Tth, h. 16.

⁶² Muhammad Sa'id Ramadhān Būthjī, *Dhawābith al-Mashlahat*, h. 27.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Abi Abdillāh Muhammad ibn Umar ibn al-Husain Fakhruddīn ar-Rāzī, *al-Maḥshūl*, h. 282. Lihat pula dalam Abi Hāmid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazālī, *al-Mustashfā*, h. 174.

upaya ini termasuk dalam spirit pemeliharaan maksud dan tujuan syarak.⁶⁵ Semua ini dipastikan tidak lepas dari tujuan awal dan proses penerapan *e-gov* itu sendiri. Apabila sejalan sebagaimana yang dikehendaki syarak, tentunya akan bernilai ibadah dan begitu pula sebaliknya. Pernyataan ini didukung oleh salah satu kaidah fikih :

الأمر بمقاصدها⁶⁶

Setiap persoalan (pelbagai kegiatan) tergantung dengan maksudnya (niat)

Diakui agak sulit untuk mengukur maksud atau tujuan seseorang (pemerintah atau masyarakat), apalagi maksud atau tujuan ini berkaitan erat dengan persoalan “batin”. Teknik yang tampaknya dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian kemaslahatan sebagaimana yang dikehendaki dalam metode *mashlahat* itu adalah menggunakan teknik observasi terhadap indikasi-indikasi yang dapat ditangkap⁶⁷ dalam penerapan *e-gov* tersebut.

b. Ruang Lingkup E-Gov

Dilihat dari segi eksistensi atau keserasian kemaslahatan dengan syarak, para pakar *ushul* fikih membagi metode organik ini ke dalam tiga macam. *Al-mashlahat al-mu'tabarat* (nilai kemaslahatan dalam suatu

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Lihat dalam Jalāluddīn Abd. Rahmān ibn Abī Bakr as-Suyūthī, *al-Asybah wa an-Nazhair fi al-Furu'*, Semarang: Taha Putera Indonesia, Tth, h. 6. Lihat pula dalam Muhammad Shidqī ibn Ahmad al-Burnū, *al-Wajiz fi lūhah Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyat*, Riyādh: Mu'assasat ar-Risālah, Tth, 45. Muhammad Ugmān Syabīr, *al-Qawā'id al-Kulliyat wa adh-Dhawābith al-Fiqhiyat fi asy-Syarī'at al-Islāmiyat*, Yordania: Dūr an-Nafāis, 2006, h. 91-100.

⁶⁷ Wahbah Zuhailī, *Ushul al-Fiqh*, Juz II, h. 929. Lihat pula dalam Nasrūn Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996, h. 170-171.

persoalan didukung oleh syarak),⁶⁸ *al-mashlahat al-mulghat* (nilai kemaslahatan dalam suatu persoalan ditolak oleh syarak),⁶⁹ dan *al-mashlahat al-mursalat* (nilai kemaslahatan dalam suatu persoalan tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh syarak).⁷⁰

E-gov adalah suatu persoalan yang tidak terdapat di dalam nas baik Alquran, Hadis, atau pun melalui hasil penelitian para pakar *ushul* fikih. Dikatakan dalam bahasa lain bahwa eksistensi *e-gov* beserta kemaslahatan yang menyertainya tidak didukung dan tidak pula ditolak syarak. Keadaan seperti ini dapat menunjukkan bahwa kemaslahatan *e-gov* masuk ke dalam ruang lingkup kajian *al-mashlahat al-mursalat*. Didukung atau tidaknya kemaslahatan *e-gov* ini akan diketahui setelah melewati kajian *e-gov* dalam ukuran standar *mashlahat* berikut ini.

3. Status Hukum *E-Gov* dalam Ukuran Standar *Mashlahat*

Para pakar *ushul* fikih menentukan beberapa ukuran standar yang dapat dijadikan sebagai pedoman ketika menghadapi suatu persoalan hukum terlebih pada persoalan-persoalan baru atau dalam ruang lingkup *al-mashlahat al-mursalat*. Beberapa ukuran standar tersebut adalah setiap persoalan yang dipandang memiliki kemaslahatan mesti mengandung kemaslahatan primer (*dharuriyyat*),⁷¹ bersifat pasti (*qath'i*) dan kemaslahatan tersebut dapat

⁶⁸ Abi Abdillāh Muhammad ibn Umar ibn al-Husain Fakhrud-dīn ar-Rāzī, *al-Maḥshūl*, h. 500. Saifuddin Abi al-Hasan 'Alī ibn Abi 'Alī ibn Muhammad al-Amīdī, *al-Iḥkām fi Ushūl al-Aḥkām*, Jilid II Juz IV, Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 1996, h. 190. Lihat pula dalam Abdul Qādir Badrīn ad-Dimasyq, *al-Madkhūl ilā Mazhab al-Imām ibn Hanbal*, Beirut-Lebanon: Mu'assasat ar-Risālat, 1401, h. 293.

⁶⁹ Abi Hāmid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazālī, *al-Mustashfā*, h. 174. Ali Ḥasballāh, *Ushūl at-Tasyrī al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1997, h. 138.

⁷⁰ Wahbah Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh*, Juz II, h. 753.

⁷¹ *Dharuriyyat* adalah kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan pokok dalam memelihara kemaslahatan baik agama atau pun dunia. Apabila kemaslahatan tersebut tidak

mengayomi kepentingan umum (*kullī*).⁷² Pakar lain yang tampak senada dengan pendapat di atas menyatakan kemaslahatan tersebut mesti bersifat primer dan pasti, dapat diterima akal sehat (*ma'qūl*) dan bukan yang bersifat khayalan serta berlaku untuk semua golongan.⁷³ Bahkan kemaslahatan yang dikandung suatu persoalan tersebut tidak bertentangan dengan nas dan hasil ijmak.⁷⁴

E-gov yang dapat dijadikan pemerintah sebagai sarana publikasi, interaksi, transaksi dan beberapa kemudahan yang diperoleh dengan menerapkan sistem ini, tampaknya memiliki manfaat atau kemaslahatan yang besar untuk kehidupan pemerintahan dan kerakyatan Indonesia. Terlebih adanya manfaat-manfaat yang secara eksplisit telah dideskripsikan sebelumnya, tampaknya menambah tingkat kredibilitas *e-gov* yang semakin merapat dan berjalan sesuai dengan ketentuan metode *mashlahat*. Membuktikan asumsi ini, maka hal yang penting dilakukan adalah mengkonsultasikan eksistensi *e-gov* dalam ukuran standar *mashlahat*.

Ukuran standar yang pertama menyatakan bahwa setiap persoalan yang dipandang memiliki kemaslahatan mesti mengandung kemaslahatan primer (*dharūriyyat*). Diakui, kemaslahatan yang dikandung *e-gov* secara sekilas tampaknya tidak mencapai pada tingkat kemaslahatan yang bersifat primer (*dharūriyyat*), melainkan hanya pada tingkat sekunder (*hājiyyat*)⁷⁵ atau

terpenuhi, maka akan mengakibatkan *mafsadat* (kerusakan atau kemudharatan) sehingga dari hal ini dapat mengakibatkan kehidupan manusia menjadi cedera. Lebih jelasnya lihat dalam Abī Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Gharnāthī asy-Syāthibī, *al-Muwāfaqat fī Ushūl*, Jilid I, Juz. II, h. 4. Lihat pula Yusuf Ahmad Muhammad Badawi, *Maqāshid as-Syari'at 'inda ibn Taimiyah*, Yordania: Dār an-Nafāis, h. 63.

⁷² Abī Hāmid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazālī, *al-Mustashfā*, h. 176.

⁷³ Husain Muhammad Mallah, *al-Fatāwā: Nasy'atuha*, Juz II, h. 494.

⁷⁴ Abdul Wahhāb Khallāf, *ʿIlm Ushūl*, h. 130.

⁷⁵ *Hājiyyat* adalah kemaslahatan yang diperlukan untuk menghindari kesulitan (*masyaqqat*) dan apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka sampai merusak kehidupan

bahkan hanya tingkat kemaslahatan tertier (*tahsīniyyat*).⁷⁸ Kendati pun pemerintah Indonesia tidak menerapkan *e-gov* sebagai salah satu alat untuk menyelenggarakan urusan negara, tampaknya tidak mengakibatkan cacat atau terancamnya sistem pemerintahan di Indonesia. Bahkan pemerintah masih dapat beraktivitas untuk kepentingan negara dan masyarakat (warga negara) pun dapat mengetahui informasi dan kemudian berinteraksi serta bertransaksi dengan pemerintah secara manual.

Persoalan yang dialami hanyalah adanya kesulitan baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat. Pemerintah tidak dapat melayani kepentingan masyarakat selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu bahkan 365 hari setahun. Akibatnya, biaya yang dikeluarkan masyarakat pun bertambah besar karena harus datang ke instansi sesuai dengan tujuan dan kepentingannya, apalagi harus berhadapan dengan pelbagai birokrasi yang kadangkala menyulitkan kedua belah pihak. Akibat selanjutnya penyelenggaraan pemerintahan pun dipandang tidak berjalan secara efisien dan efektif.

Saat ini pelbagai kesulitan di atas diakui hanya sebatas tingkat *hājiyyat*, namun apabila keadaan seperti ini diabaikan tampaknya kesulitan-kesulitan tersebut sebagai titik awal yang dapat menghantarkan kepada kesulitan yang besar sehingga dapat berakibat merusak sistem pemerintahan dan kerakyatan Indonesia. Mempertimbangkan keadaan demikian dan sebagai upaya preventif bertambah besarnya kemudahan yang akan dihadapi, maka tampaknya kebutuhan terhadap penerapan *e-gov* sebenarnya berada pada tingkat *dharūriyyat*. Terlebih apabila mengkaji kembali bentuk-bentuk pelayanan *e-gov* beserta manfaat-manfaat yang diperoleh dengan menerapkan

manusia. Lebih jelasnya lihat dalam Abi Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Gharnāthī asy-Syāthibī, *al-Muwāfaqat fī Ushūl*, Jilid I, Juz. II, h. 4. Lihat pula Yusuf Ahmad Muhammad Badawi, *Maqāshid as-Syarī'at 'inda Ibn Tuīmīyah*, Yordania: Dār an-Nafāis, h. 66.

⁷⁸ *Tahsīniyyat* adalah kemaslahatan penunjang dan sebagai penyempurna dua kemaslahatan sebelumnya. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, tidak akan mempersulit apalagi sampai merusak kehidupan manusia. Lihat *Ibid*.

e-gov, tampaknya pelbagai kemaslahatan dalam *e-gov* itu juga bersifat pasti (*qath'i*) dan bukan bersifat meraba atau khayalan. Hal ini dapat dibuktikan baik melalui fakta rasio (normatif) atau melalui fakta empiris (sosiologis) bahwa penerapan *e-gov* bukan hanya sekedar menanggapi pelbagai kemajuan teknologi, namun jauh dari hal tersebut adalah untuk memberikan manfaat secara nyata (*real*) dan penuh kepastian kepada pemerintah sendiri dan juga kepada masyarakat.

Selanjutnya dikatakan bahwa kemaslahatan suatu persoalan khususnya tentang *e-gov* mesti dapat mengayomi dan merepresentasi kepentingan umum (*kullî*). Indonesia adalah negara besar dengan jutaan penduduk yang menjadi warga negara atau dipandang Undang-Undang sebagai warga negara Indonesia. Sebagai negara yang besar, dipastikan pula apabila terdapat kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan salah satunya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* adalah membuktikan bahwa hal tersebut berlaku untuk kepentingan umum. Kendati pun penerapan *e-gov* ini diterapkan pemerintah masing-masing daerah, namun informasi yang dipublikasikan dapat dinikmati seluruh penduduk Indonesia. Begitu pula interaksi dan transaksi juga dapat dilakukan, walaupun dilakukan oleh seseorang yang berbeda wilayah bahkan negara sekalipun.

Menurut ukuran standar yang lain bahwa dalam mempertimbangkan suatu kemaslahatan, mesti dipastikan kemaslahatan tersebut dapat dijangkau dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Apabila melihat beberapa deskripsi tentang manfaat penerapan *e-gov*, di sana telah dapat diketahui apakah kemaslahatan yang diraih dapat diterima akal sehat atau sebaliknya. Pada masa sekarang kemudahan mendapatkan informasi dan mengadakan hubungan melalui forum interaksi bahkan transaksi di tempat yang saling berbeda, dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit adalah satu persoalan yang bukan hal yang mustahil. Hal ini disebabkan bahwa teknologi komunikasi dan informasi seperti ini telah dikenal penduduk Indonesia secara luas, sehingga penerapan *e-gov* pun bukan berada pada kategori di luar akal sehat. Berbeda apabila

model ini ditanggapi orang-orang yang hidup di zaman primitif. Dipastikan akan ditanggapi sebagai sesuatu yang mustahil dapat terjadi, sebab menurut logika mereka perbuatan seperti ini biasanya hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bertelepati dengan pihak lain.

Beralih pada ukuran standar terakhir yang menyatakan bahwa suatu persoalan -seperti *e-gov*- yang dipandang mengandung suatu kemaslahatan mesti tidak bertentangan dengan nas dan ijmak. Sampai sekarang belum ditemukan adanya nas-nas atau hasil kesepakatan para ulama (ijmak) yang mengharamkan penggunaan teknologi apalagi berkaitan dengan *e-gov*. Begitu pula sebaliknya, tidak pula ditemukan adanya teks-teks nas yang mendukungnya secara eksplisit. Namun apabila dikaji dengan menggunakan metode induktif, tampaknya generalisasi dari hasil kajian ini menunjukkan bahwa *e-gov* mendapatkan dukungan melalui semangat atau spirit yang ada dalam Alquran. Bukti dukungan itu, dapat dilihat kembali dari hasil konsultasi *e-gov* dengan beberapa ukuran standar di atas. Semuanya memandang bahwa *e-gov* sebenarnya mengandung kemaslahatan primer, pasti, berlaku untuk umum dan sejalan dengan alur logika Alquran dan manusia. Sampai di sini tampaknya tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa *e-gov* bertentangan dengan nas, terlebih lagi tidak ditemukan adanya teks-teks Alquran yang menolak penerapan sistem pemerintah elektronik ini. Berkaitan dengan hal ini, para pakar *ushūl* fikih Syafi'iyah merumuskan satu kaidah fikih yang tertulis sebagai berikut :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم⁷⁷

Asal pelbagai sesuatu adalah dibolehkan sampai adanya dalil (petunjuk) yang mengharamkan melakukannya.

⁷⁷ Jalāluddīn Abd. Rahmān ibn Abī Bakr as-Suyūthī, *al-Asybah wa an-Nazhair*, h. 43.

Kemungkinan terbesar adanya dalil (petunjuk) yang menyebabkan *e-gov* dilarang diterapkan di Indonesia adalah apabila kehadiran *e-gov* tidak senafas dan bahkan mendatangkan kemudharatan baik pada pemerintah atau pun pada rakyat Indonesia. Setidaknya kemudharatan tersebut datang dari beberapa hambatan efektivitas penerapan *e-gov* sebagaimana telah diuraikan pada bahasan sebelumnya. Oleh karena itu apabila Indonesia menginginkan tercapainya pelaksanaan pemerintahan secara elektronik ini, maka hal yang terpenting dilakukan pemerintah sejak saat ini mesti menghilangkan atau setidaknya mengendalikan dan mengurangi hambatan-hambatan tersebut. Caranya tidak ada jalan lain kecuali meningkatkan sumber daya dan memfasilitasi infrastruktur yang menjadi kebutuhan *e-gov*.

Berkaitan dengan kemestian menghilangkan kemudharatan di atas, para pakar *ushûl* fikih menyatakan dalam salah satu kaidah fikih yang tertulis sebagai berikut :

الضرر يزال⁷⁸

Kemudharatan mesti dihilangkan

Kendati tidak semua kemudharatan dapat dihilangkan secara total, namun dengan tetap berupaya secara maksimal untuk mengendalikan sampai hilangnya kemudharatan tersebut, para pakar *ushûl* fikih juga menyuguhkan sebuah sikap dan dituang dalam sebuah kaidah fikih yang tertulis sebagai berikut :

درء المفاسد أولى (مقدم على) من جلب المصالح⁷⁹

⁷⁸ Ibid., h. 59. Lihat pula dalam Ali Ahmad an-Nadwî, *al-Qawâid al-Fiqhiyyat: Maḥmūhah, Nasy'atuhā, Tathawwūrahā, Dirāsah Muallafātihā, Adallatuhā, Muḥimmatuhā, Tathbiqātuhā*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2000, h. 136

⁷⁹ Ibid., h. 207. Bandingkan dengan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 310. Lihat pula dalam Mukhtar Yahya, et. al., *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al-Ma'arif, 1993, h. 486.

Menolak pelbagai kerusakan lebih utama (lebih didahulukan) daripada mengambil pelbagai kemaslahatan.

Pentingnya penolakan kerusakan yang diakibatkan dari penerapan *e-gov* ini, selain disebabkan terancamnya legalitas penerapan *e-gov* dalam kaca mata ukuran standar *mashlahat* juga disebabkan bahwa eksistensi *e-gov* dalam ruang lingkup kajian *zari'at* yang merupakan ekstensifikasi dari metode *mashlahat* adalah sebagai media, sarana, jalan atau wasilah.⁸⁰ Eksistensi *e-gov* seperti ini, menjadikan *e-gov* memiliki dua alternatif kemungkinan. Kemungkinan pertama, *e-gov* dapat berfungsi sebagai pengantar dalam mewujudkan suatu kebaikan (kemaslahatan), namun dalam kemungkinan kedua *e-gov* juga berpotensi untuk mengantarkan kepada suatu keburukan dan kerusakan (kemudharatan).⁸¹

Proses yang dilakukan untuk mengetahui bahwa suatu persoalan seperti *e-gov* berada pada salah satu dua kemungkinan di atas, tampaknya jalan yang tepat dilakukan adalah mengkaji tujuan yang telah direncanakan sebagai target pencapaian kemudian beralih pada proses penerapan *e-gov* (*zari'at*) dan terakhir mengkaji hasil (*natijat*) penerapan *e-gov* (*zari'at*). Ketiga macam ini mesti dilihat sebagai satu kesatuan yang integratif. Apabila melalui pengkajian yang serius atau berdasarkan hasil prediksi yang kuat bahwa menerapkan *e-gov* dapat berbuah (*natijat*) kemudharatan, maka menerapkan *e-gov* sama dengan mendatangkan kemudharatan. Sebaliknya apabila berbuah (*natijat*) kemaslahatan, maka penerapannya pun mesti dibuka secara luas dan panjang lebar.

E-gov yang tidak dapat mewujudkan kebaikan disebut *sadd az-zari'at* dan status hukumnya pun haram, sedangkan *e-gov* yang dapat mewujudkan suatu kemaslahatan disebut *fath az-zari'at* dan status hukumnya adalah *mubah*

⁸⁰ Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Jilid II, Juz III, Kairo: Dar al-Hadig, 2002, h. 103. Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, Juz II, h. 902.

⁸¹ Husain Muhammad Mallah, *al-Fatawa: Nasy'atuha*, Juz II, h. 531.

bahkan wajib.⁸² Berkaitan dengan wajibnya menerapkan *e-gov* yang mampu mewujudkan kemaslahatan, pakar *ushûl* fikih memformulasikan sebuah kaidah *fatḥ az-zari'at* yang tertulis sebagai berikut:

مَا لَا يَتَمَّ الْوَاجِب إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ⁸³

"*Sesuatu [ibadat atau muamalah] yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya [zari'at], maka melaksanakannya [zari'at] adalah wajib.*"

Kaidah di atas menunjukkan bahwa pemerintah diwajibkan untuk menyelenggarakan roda pemerintahan secara efektif dan efisien serta memberikan pelayanan dan kemudahan kepada warga negaranya. Namun kewajiban tersebut tidak sempurna dijalankan sesuai dengan ajaran asas-asas pemerintahan yang layak (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*)⁸⁴ kecuali disertai dengan penerapan *e-gov*, maka penerapannya pun tidak diwajibkan sebagai sebab terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

4. Penutup

E-gov merupakan sebuah persoalan kontemporer dalam fikih yang apabila dikaji melalui metode *mashlahat* termasuk dalam kategori *al-mashlahat al-mursalat*. Disebut demikian karena eksistensi *e-gov* tidak pernah dijelaskan dalam Alquran, Hadis dan terlebih lagi dalam hasil penelitian para

⁸² Abi Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Gharnāthī asy-Syāthibī, *al-Muwāfaqat fī Ushūl*, Jilid II, Juz. IV, h. 111. Lihat pula Abu Zahrah, *Ushūl al-Fiqh*, h. 228.

⁸³ Abi Hāmid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazālī, *al-Mustashfā*, h. 57. Lihat pula dalam Abi al-Hasan 'alā ad-Dīn 'alī ibn Abbās ibn Lihām al-Ba'li al-Hambalī, *al-Qawāid wa al-Fawāid al-Ushūliyat wama Yata'allaqu bihā min al-Ahkām al-Far'iyat*, Beirut-Libanon: Dār al-Kutb al-'Ilmiyat, 2001, h. 81.

⁸⁴ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002, h. 190-191.

pakar *ushûl* fikih baik menolak atau pun mendukungnya.

Kehadiran *e-gov* di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia baik sebagai media publikasi, forum interaksi dan transaksi menurut sudut pandang ukuran standar metode *mashlahat* dipandang memiliki kekuatan argumentasi yang cukup kuat. Melalui hasil konsultasi yang dilakukan *e-gov* mengandung kemaslahatan yang bersifat primer (*dharûriyyat*), pasti (*qath'i*), mengayomi kepentingan umum (*kullî*), dapat diterima akal sehat (*ma'qûl*) dan bukan yang bersifat khayalan serta tidak bertentangan dengan nas dan hasil ijmak. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa status hukum *e-gov* dalam perspektif *mashlahat* sebagai *mubah* (dibolehkan) bahkan apabila benar dapat mengantarkan kepada pelbagai kemaslahatan di atas, maka penerapan *e-gov* pun dipandang wajib.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyq, Abdul Qâdir Badrân. *al-Madkhâl ilâ Mazhab al-Imâm ibn Hanbal*. Beirut-Libanon: Mu'assasat ar-Risâlat, 1401.
- Al-Amidî, Saifuddin Abî al-Hasan 'Alî ibn Abî 'Alî ibn Muhammad. *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*. Jilid II Juz IV, Beirut-Libanon: Dâr al-Fikr, 1996.
- Al-Ba'li, Abî al-Hasan 'alâ ad-Dîn 'alî ibn Abbâs Ibn Liham al-Hambalî. *al-Qawâid wa al-Fawâid al-Ushûliyyat wamâ Yata'allaqu bihâ min al-Ahkâm al-Far'iyat*. Beirut-Libanon: Dâr al-Kutb al-'Ilmiyyat, 2001.
- Al-Bardisi, Muhammad Zakariya. *Ushûl al-Fiqh*. Mesir: Dâr an-Nahdhat al-'Arabiyyat, 1969.
- Al-Burnû, Muhammad Shidqî ibn Ahmâd. *al-Wajîz fî Idhâh Qawâid al-Fiqh al-Kulliyat*. Riyâdh: Mu'assasat ar-Risâlat, Tth.
- Al-Ghazâlî, Abî Hâmid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad. *al-Mustashfâ fî 'Ilm al-Ushûl*. Pentashih oleh Muhammad 'Abdussalâm 'Abdussanî, Beirut-Libanon: Dâr al-Kutb al-'Ilmiyah, 2000.
- Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim. *I'lâm al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamîn*. Jilid II, Juz III, Kairo: Dâr al-Hadîs, 2002.

- Al-Juwaini, Imâm al-Haramain Abî al-Ma'âli Abdul Mâlik ibn Abdullah ibn Yûsuf. *al-Burhân fî ushûl al-Fiqh*. Juz II, Cet I, Beirut-Libanon: Dâr al-Kutb al-'Ilmiyah, 1997.
- Al-Turabi, Hasan. *Fiqh Demokratis: dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*. Diterjemahkan oleh Abdul Haris dkk, dari buku asli yang berjudul "Tajdid al-Fikr al-Islami", Bandung: Mizan, 2003.
- An-Nadwî, Ali Ahmad. *al-Qawâid al-Fiqhiyah: Mafhûmuhâ, Nasy'atuhâ, Tathawwuruhâ, Dirâsat Muallafâtihâ, Adallatuhâ, Muhimmatuhâ, Tathbiqâtuhâ*. Damaskus: Dâr al-Qalam, 2000.
- An-Na'im, Abdullâh Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah*. Diterjemahkan oleh Ahmad Suedy dkk dari buku asli yang berjudul "Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law," Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Anonim. *Konsep Perencanaan dan Perancangan E-Government (Pada Pemda Kab. Pekalongan)*. <http://www.mti.ugm.ac.id/~adji/courses/resources/students/Toto/Konsep%20Perencanaan%203.Doc>, 2006, Diakses tanggal 30 April 2007.
- Anonim. *E-Gov: Hambatan Kami, Terbatasnya Anggaran dan SDM*. <http://solusihukum.com/berita.php?id=321>, 2004. Diakses 13 April 2009.
- Ar-Râzî, Abî Abdillâh Muhammad ibn Umar ibn al-Husain Fakhruddîn. *al-Mahshûl fî 'Ilm al-Uhûl*. Jilid II, Beirut-Lebanon: Dâr al-Kutb al-'Ilmiyah, 1999.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- As-Suyûthî, Jalâluddîn Abd. Rahmân ibn Abî Bakr. *al-Asybah wa an-Nazhâir fî al-Furû'*. Semarang: Taha Putera Indonesia, Tth.
- Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idrîs. *ar-Risâlah*. Kairo: Dâr al-Turas, 1979.
- Asy-Syâthibî, Abî Ishâq Ibrâhîm ibn Mûsâ al-Gharnâthî. *al-Muwâfaqat fî Ushûl al-Ahkâm*. penta'lik Muhammad al-Khudri al-Husain at-Taulisi, Jilid I, Juz II, ttp: Dâr al-Fikr, Tth.

- Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad. *Maqâshid as-Syari'at 'inda ibn Taimiyah*. Yordania: Dâr an-Nafâis.
- Bisri, Cik Hasan. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Bandung: Ulul Albab Press, 1997.
- . *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*. Cet. I, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Bûthî, Muhammad Sa'id Ramadhân. *Dhawâbith al-Mashlahat fî asy-Syari'at al-Islâmiyah*. Cet. VI, Beirut-Lebanon: Mu'assasat ar-Risâlat, 2001.
- Chandra. *Electronic Government*. dalam <http://chandrax.wordpress.Com/2008/05/21/electronic-government-e-government/>, 2008, Diakses 13 April 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Devi, Ade Rachmawati. et.al. *Penerapan Electronic Government: Melompatlah Jika Tak Ingin Tertinggal*. <http://www.warta-cgov.com/default.asp>, Rabu 26 Juli 2006, 10:14 WIB, Diakses 30 April 2007.
- Fitriawan, Helmy. *E-Government: Sistem Layanan Publik Berbasis Teknologi Komunikasi dan Infoemasi*. <http://elang.mistc.unila.ac.id/~helmy/paper/Egovernment%20Sistem%20layanan%20publik%20berbasis%20teknologi%20info.pdf>, 2008, Diakses 13 April 2009.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia: dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos, 1996.
- Hasan, Husain Hâmid. *Nazhariyat al-Mashlahat fî al-Fiqh al-Islâmî*. Kairo: Dâr an-Nahdhat al-'Arabiyyat, 1971.
- Hasballâh, 'Alî. *Ushûl at-Tasyrî' al-Islâmî*. Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1997.
- Ibn Qudâmah, Abû Muhammad Abdullah ibn Ahmad al-Maqdisi. *Raudhat an-Nazhir wa Junnat al-Manâzhir*. Pentahkik Abdul Aziz Abdurahman Sa'id, Cet. II, Riyâdh: Jami'at al-Imam Muhammad ibn Su'ûd, 1979.

- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. II, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Juni S. *Implementasi E-Government*. <http://www.pureportals.com/Default.aspx?tabid=210050&newsType=ArticleView&articleId=848>, 2007, Diakses 1 April 2009.
- Khallâf, Abdul Wahhâb. *Ilm Ushûl al-Fiqh*. Cet. XII, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.
- Makarim, Edmon. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mallah, Husain Muhammad. *al-Fatâwâ: Nasy'atuha wa Tathawwuruha – Ushûluha wa Tathbiqatuha*. Juz I, Cet. I, Beirut: al-Maktabat al-'Ashriyat, 2001.
- Marhijanto, Bambang. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*. Surabaya: Bintang Timur, 1993.
- Mu'allim, Amir, et.al. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Cet. I, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Mudzhar, Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*. Cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Muhadjir, Neong. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Edisi IV, Cet. I, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Namlah, Abdul Karim ibn 'Ali ibn Muhammad. *Ithâf Zawi al-Bashâir bi Syarh Raudhat an-Nazhîr fî Ushûl al-Fiqh 'alâ Mazhab al-Imam Ahmad ibn Hambal*. Cet. I, Jilid IV, Riyâdh: Dâr al-'Ashimat, 1996.
- Rahardjo, Budi. *Makalah: Membangun E-Government*. URL <http://www.geocities.com/seminarts/e-gov-makassar.doc>, 2001, Diakses 1 April 2009.
- Rahman, Fazlur. *Metode dan Alternatif: Neomodernisme Islam*. Diterjemahkan dan disunting oleh Taufik Adnan Amal dari beberapa artikel Fazlu Rahman yang berbahasa Inggris, Bandung: Mizan, 1989.
- _____. *Islam*. Diterjemahkan oleh Seoaji Saleh dari buku asli yang berjudul "Islam," Jakarta: Bumi Askara, 1992.

- Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Rokhman, Ali. *Customer Service Pemerintah melalui E-Government*. dalam <http://72.14.235.132/custom?q=cache:jZY3XuQW6bwJ:lpks1.wima.ac.id/pphks/accurate/makalah/MOSS6.pdf+hambatan+electronic+government&cd=26&hl=en&ct=clnk&client=pub-2808051115066427>, 2008, Diakses 13 April 2009.
- Satria, Eddy. *Pentingnya Revitalisasi E-Government di Indonesia*, dalam <http://www.Batan.go.id/sjk/cII2006/Page01/P0li.pdf>, 2006, Diakses 1 April 2009.
- Soekanto, Sarjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III, Jakarta: UI Press, 1986.
- _____. *et.al, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sosiawan, Edwi Arief. *Tantangan dan Hambatan Implementasi E-Government di Indonesia*. <http://edwi.dosen.upnyk.ac.id>, Maret 2008, Diakses 13 April 2009.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Cet II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Susartono. *E-Government di Indonesia*. dalam http://www.fisip.uns.ac.id/publikasi/sp2_1_susartono.pdf, 2006, Diakses 1 April 2009.
- Syah, Amir Bad. *Taisir al-Tahrir*. Jilid II, Mesir: Mushtafā al-Bāb al-Halabī, 1351.
- Syabir, Muhammad Usmān. *al-Qawāid al-Kulliyat wa adh-Dhawābith al-Fiqhiyat fī asy-Syari'at al-Islāmiyat*. Yordania: Dār an-Nafāis, 2006.
- Taha, Mahmoūd Muhammed. *Syari'ah Demokratik*. Diterjemahkan oleh Nur Rachman dari buku asli yang berjudul "The Second Message of Islam," Surabaya: eLSAD, 1996.
- Word Bank. <http://www1.worldbank.org/publicsector/e-gov/definition.htm>, Diakses 13 April 2009.

- Yahya, Mukhtar, *et. al. Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: al-Ma'arif, 1993.
- Zahrah, Abu. *Ushûl al-Fiqh*. Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, Tth.
- _____. *Abû Hanîfah: Hayâtuhu wa 'Ashruhu- Arâ'uhu wa Fiqhuhu*. Cet I, Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1997.
- _____. *Ibn Hanbal: Hayâtuhu wa 'Ashruhu- Arâ'uhu wa Fiqhuhu*. Cet I, Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1997.
- Zarqa, Mushthafa Ahmad. *Hukum Islam & Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Mazhab*. Diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana dari buku asli yang berjudul "*al-Istishlâh wa Mashâlih al-Mursalat fi asy-Syarî'a al-Islâmiyah wa Ushûl Fiqh*," Cet. I, Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- Zuhailî, Wahbah. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*. Juz I, Damaskus-Suriyah: Dâr al-Fikr, 2001.